

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian di lapangan dan menganalisis data sehubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan analisis peneliti menguraikan lebih mendalam tentang Strategi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Wajo Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil temuan penelitian. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian. Setelah mendeskripsikan hasil temuan dilanjutkan dengan analisis. Analisis yang dilakukan merupakan hasil penelitian terhadap temuan-temuan penelitian yang didukung oleh teori yang dipandang relevan yaitu teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Syafi'i 2015). Dalam menganalisis penelitian ini penulis mengacu pada empat aspek yaitu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, pengakuan otoritas terkait, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang berkaitan dengan pengembangan kampung adat wajo menjadi desa wisata. Keempat aspek tersebut dianalisis sebagai berikut:

5.1 Pengembangan Pariwisata dengan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Langkah ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan kampung adat Wajo sebagai desa wisata dengan merujuk pada strategi yang disiapkan oleh

Pemerintah Daerah dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dinas Pariwisata untuk menjalankan strategi yang dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun beberapa strategi yang direncanakan yakni meningkatkan kualitas, kondisi, dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, meningkatkan pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di destinasi pariwisata, meningkatkan apresiasi dan pengembangan wahana seni budaya lokal di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa indikator yang dapat mengukur sejauh mana persiapan yang direncanakan oleh Pemerintah, dinas pariwisata dan masyarakat dalam menjalankan strategi yang telah di rencanakan. Aspek pemberdayaan pariwisata dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dianalisis menggunakan indikator berikut ini.

5.1.1 Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Wajo

Menurut Wahyuningsi (2018) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu cara untuk bersaing dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Pendapat lain juga dijelaskan oleh Oktosilva (2018) strategi merupakan sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan dari individu atau organisasi. Dari kedua penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa strategi merupakan segala bentuk perencanaan yang berfokus pada suatu tujuan dan dilakukan

dengan berbagai cara atau upaya agar dapat tercapai tujuan dalam hal ini pengembangan Kampung Adat Wajo.

Untuk menggambarkan strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Wajo, maka dianalisis dari hasil wawancara dengan para informan berikut ini:

Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Primus Daga berpendapat terkait strategi pengembangan kampung adat Wajo, mengatakan bahwa:

Kalau untuk strategi yang sedang dilakukan oleh Dinas Pariwisata saat ini yaitu kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata tingkat dasar. Berikutnya yaitu dengan melakukan promosi tentang Kampung Adat Wajo ini ke khalayak ramai dengan mengadakan festival. Pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan infrastruktur jalan dan yang terakhir yaitu dengan melakukan pembuatan produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah misalnya dengan menenun dan pembuatan makanan lokal seperti *kembang*, *cucur* dan lainnya.

Pendapat di atas didukung oleh pendapat kepala Desa Wajo Gabriel Wundu mengenai strategi pengembangan kampung Adat Wajo, mengatakan bahwa:

Kalau untuk strategi pengembang Kampung Adat Wajo yang paling utama yaitu dengan harus adanya perbaikan infrastruktur jalan menuju Kampung Adat Wajo, berikutnya yaitu dengan penataan ulang kampung adat (*tule kota*), selain itu juga penyediaan sarana dan prasarana umum yang belum tersedia di Kampung Adat Wajo, selanjutnya dengan pembangunan kembali gapura atau penunjuk arah menuju kampung adat Wajo yang sudah rusak di terpa angin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas terkait strategi yang direncanakan peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa sebagian strategi yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik terlebih khusus dalam peningkatan kapasitas SDM pariwisata tingkat dasar kepada masyarakat dan juga strategi pemasaran Kampung Adat Wajo ke khalayak umum oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan festival “*Nagekeo one be festival*” yang di dalamnya memperkenalkan kabupaten Nagekeo dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Namun peneliti juga menemukan dari usulan yang disampaikan di atas masih banyak yang belum terealisasi atau dijalankan. Saat observasi di lokasi peneliti menemukan akses jalan menuju kampung Adat Wajo yang masih rusak (tanah), tidak tersedianya papan penunjuk arah atau gapura, tidak tersedianya penjualan souvenir atau produk lokal, dan tidak tersedianya sarana prasarana umum seperti rumah makan, homestay, toilet umum dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat untuk mewujudkan strategi yang direncanakan sehingga kedepannya dapat menarik banyak pengunjung.

Seluruh strategi yang sudah direncanakan di atas dapat berjalan dengan lancar jika masyarakat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatannya. berpartisipasi

Gambar 5.1

Pelatihan Pemandu Wisata Tingkat Kabupaten Nagekeo



Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo 2022

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan menciptakan kesadaran masyarakat pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat sebagai satu sistem control terhadap jalannya pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang mengandung keutamaan dan kearifan, meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan berorganisasi (Erika J, 2014: 13).

Dari pengertian di atas penulis dapat simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan pengembangan Kampung Adat Wajo diperlukan dalam proses pembangunan desa wisata agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan pariwisata akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian alam.

Adytama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Primus Daga mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung adat Wajo, mengatakan bahwa:

Untuk pengembangan Kampung Adat Wajo masyarakat setempat memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam hal ini di bawah pengawasan Dinas Pariwisata. Masyarakat bisa membantu mempromosikan Kampung Adat Wajo, alat musik tradisionalnya, dan juga membuat produk-produk lokal yang ada di Kampung Adat Wajo dan dapat dipasarkan ke pengunjung atau wisatawan yang datang.

Pendapat dia atas dibenarkan oleh pendapat Kepala desa wajo Gabriel Wundu mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Wajo

Keterlibatan masyarakat dalam Pengembangan Kampung Adat Wajo ini sangat diperlukan Kedepannya baik secara fisik dan non fisik yaitu dengan berkontribusi dalam setiap program pengembangan desa wisata, partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas dan lainnya. Selanjutnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mempromosikan Kampung Adat Wajo melalui media sosial.

Kedua hasil wawancara sebelumnya di dukung oleh pendapat Bapak Paulus Jogo selaku masyarakat Desa Wajo mengatakan hal berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kampung adat Wajo

Kami sebagai masyarakat desa Wajo semampu kami untuk terlibat aktif dalam pengembangan Kampung Adat Wajo ini. Namaun keterlibatan kami ini tergantung dorongan dan kerjasama dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mengingat keterbatasan SDM yang kami miliki.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa baik masyarakat memiliki hak penuh untuk bersama dengan pemerintah dalam pengembangan kampung Adat Wajo melalui setiap program yang sudah disiapkan oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan produk-produk lokal dan juga membuat aneka jajanan lokal. Namun yang menjadi kendala yaitu minimnya SDM yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka membutuhkan dorongan dan kerja sama dari pemerintah untuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengembangan desa wisata.

Gambar 5.2

Partisipasi Masyarakat Dalam Membuat Tas Anyaman (Bere/Bola Oka)



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo

5.1.2 Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kampung Adat Wajo

Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya maupun potensi-potensi yang ada untuk untuk kesejahteraan masyarakat Wajo. Dalam pemberdayaan masyarakat desa Wajo dilatih untuk menghasilkan produk-produk lokal yang dapat dijadikan peluang usaha dan mendapatkan penghasilan dari situ.

Adytama pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan hal mengenai pemberdayaan masyarakat desa Wajo.

Sejauh ini masyarakat sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan tenun ikat dan juga selendang, dimana pemerintah menyediakan bahan yang diperlukan untuk menenun seperti benang, dan ketika kain tenunnya sudah jadi maka pemerintah akan membantu masyarakat untuk memasarkan hasil tenunnya. Selain itu juga masyarakat dapat menghasilkan produk lain yang dapat dijadikan souvenir yaitu berupa tas anyaman (bere) dan juga piring tradisional (wati)

Gambar 5.3

Kegiatan Pemberdayaan Tenun Ikat



Sumber: Dokumentasi pribadi

Hal serupa juga ditambah oleh Kepala Desa Wajo Gabriel Wundu mengenai pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk pemberdayaan masyarakat desa sejauh ini kami bersama melakukan program bersama-sama ibu-ibu kelompok tenun yang diswadayai oleh pemerintah untuk menenun kain adat dari Nagekeo dan juga masyarakat Wajo melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pelatihan pembuatan minyak kelapa Murni, jajanan lokal dan juga masyarakat desa setempat di latih untuk membuat souvenir dari mutan lokal seperti tas anyaman.

Bapak Arnoldus Jogo menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal

Untuk produk-produk lokal masyarakat di sini menyediakan beberapa macam produk seperti tenun ikat, selempang, tas dari anyaman (bere/gabha) piring dan gelas dari bahan-bahan lokal. Namun dalam proses pemasaran sendiri

selain mempromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke kampung adat Wajo kami juga menjual produk-produk kami ke pasar lokal dengan harga yg cukup rendah karena masih minimnya pengunjung yang datang ke kampung ada Wajo.

Gambar 5.4

Hasil Tenun Ikat Masyarakat Yang Dipromosikan Oleh Dinas Pariwisata



Sumber Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat lokal sudah dapat menghasilkan produk-produk lokal yang dapat dijual kepada wisatawan. Namun yang menjadi kendala masih minimnya kunjungan wisatawan ke Kampung Adat Wajo sehingga untuk menjual produk-produk yang dihasilkan masyarakat harus menjualnya ke pasar lokal dengan harga yang relatif rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dalam proses pengembangan desa wisata ini lebih memperhatikan hal-hal yang menunjang daya tarik

wisatawan untuk berkunjung ke Tempat Wisata ini sehingga kedepannya masyarakat dapat mempromosikan sekaligus menjual produk-produk lokal kepada wisatawan.

5.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Terkait

Dalam pengembangan pariwisata Kampung Adat Wajo harus adanya kerja sama. Kerja sama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama baik dengan pemerintah, maupun dengan masyarakat lokal.

Dalam pengembangan Kampung Adat Wajo perlu adanya kemitraan dari beberapa pihak terkait yang dapat dilihat dalam pendekatan pentahelix dimana unsur Pemerintah, akademis, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media massa berkolaborasi dan bermitmen untuk mencapai tujuan yang sama.

Mengenai kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait Adytama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bapak Primus Daga mengatakan.

sejauh ini untuk kemitraan antara pemangku kepentingan yang sudah terjalin yaitu antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga masyarakat. Kami dari pemerintah Daerah sendiri berperan sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata yaitu dengan melakukan pelatihan berupa penguatan SDM masyarakat desa Wajo yang masih belum memenuhi standar minimal, antara lain penguasaan bahasa asing, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan juga manajemen kualitas pelayanan atau infrastruktur, untuk itu kami dari Dinas

Pariwisata menggelar pelatihan-pelatihan tentang tata kelola pariwisata dan untuk kemitraan melalui unsur pentahelix sejauh ini kita belum menjalin kerjasama mungkin kedepannya dalam pengembangan pariwisata di kabupaten nagekeo kita akan menjalin kemitraan dengan unsur-unsur pentahelix.

Kepala desa wajo dalam wawancara mengenai kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait pada mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa sejauh ini sudah menjalin kerjasama dengan masyarakat Kampung Adat Wajo ini baik secara fisik maupun non fisik. secara fisik kami selaku pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat, mendampingi mereka dalam kegiatan penataan kembali kampung Adat Wajo (tule kota) di bulan November kemarin, selain itu juga secara non fisik kami juga mengalokasikan sedikit dana untuk pengembangan Kampung Adat Wajo.

Bapak Arnoldus Jogo selaku kepala Adat di kampung Wajo berpendapat mengenai kemitraan dengan kepentingan terkait

Selama ini kami masyarakat dengan pemerintah bersama-sama melakukan kegiatan pengembangan desa wisata melalui program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah, salah satunya melalui kegiatan penataan Kembali kampung Adat Wajo, pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Namun masih banyak hal yang menjadi kekurangan seperti infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa Kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait sejauh ini yang sudah terjalin yaitu antara, masyarakat, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dan juga sudah menjalankan berbagai program-program dasar dalam pengembangan Kampung Adat Wajo yaitu dari Pemerintah Daerah dengan memberikan pelatihan-pelatihan penguatan SDM masyarakat, selain itu dengan mempromosikan Kampung Adat Wajo ke public, dan juga pemerintah desa melalui sumbangsinya baik secara fisik maupun nono fisik dalam pengembangan kampung adat Wajo, dan juga masyarakat Kampung Adat Wajo yang sudah berpartisipasi aktif dalam pengembangan kampung Adat Wajo. Namun yang masih perlu diperhatikan dalam pengembangan Kampung Adat Wajo ini perlu meningkatkan pola kemitraan antara para pemangku kepentingan, yaitu melalui pola pentahelix dimana terdapat unsur Pemerintah, akademis, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media massa berkolaborasi dan bermitmen untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga kedepannya dalam pengembangan Kampung Adat Wajo menjadi lebih efisien.

5.3 Pengakuan Otoritas Terkait

Pengakuan dari otoritas terkait merupakan salah satu prasyarat penilaian kesuksesan dari pengelolaan CBT (The ASEAN Secretariat, 2016:2). Keberhasilan Desa Wajo dalam Mengembangkan Kampung Adat Wajo ini mendapatkan pengakuan dari berbagai otoritas terkait.

5.3.1 Otoritas Tingkat Desa dalam Mengakui Keberadaan Kampung Adat Wajo

Keberadaan Desa Wisata menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Untuk itu masyarakat memiliki andil yang cukup dalam setiap proses pengembangan Desa Wisata agar mendapat pengakuan dari pemerintah setempat.

Adytama kepariwisataan Primus Daga mengatakan mengenai pengakuan otoritas tingkat desa tentang keberadaan desa wisata

Pengakuan otoritas tingkat Desa sangat penting berhubung Desa Wisata merupakan inisiatif lokal. Desa memiliki kekuasaan sekaligus tanggung jawab untuk mengatur pengembangan Desa Wisata dengan berbagai kegiatan dan program di wilayah mereka sendiri.

Kepala Desa Wajo bapak Gabriel Wundu, beliau berpendapat mengenai pengakuan Pemerintah Desa mengenai keberadaan desa wisata.

Pemerintah desa mengakui keberadaan desa wisata yang berada di Desa Wajo ini, dengan melihat potensi-potensi yang ada di Kampung Adat Wajo ini dapat dijadikan sebuah atraksi yang dapat dijadikan Dya Tarik Wisata. Dan rencana kami di tahun 2024 akan memberikan pengakuan resmi dalam bentuk Pengakuan Kepala Desa dan juga Peraturan Desa. Selain itu juga kami bersama tokoh adat dan masyarakat setempat telah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) "*udu koto eko wajo*" pada tanggal 26 November 2023 kemarin dan akan dilakukan SOP bersama dengan dengan Dinas Pariwisata untuk menentukan standarisasinya. Pokdarwis ini nantinya akan membawahi sekian usaha kelompok ekonomi kreatif untuk dijadikan

pengembangan ekonomi keluarga, dan juga sebagai bahan atau materi yang bisa dinikmati oleh wisatawan.

Hal serupa juga dibenarkan oleh bapak Arnoldus Jogo selaku kepala adat Wajo yang mengatakan bawa

Kami masyarakat Desa Wajo senang karena sudah mendapat pengakuan dari pemerintah desa mengenai keberadaan desa wisata ini melalui upaya-upaya yang sudah banyak dilakukan baik melalui pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang menjadi salah satu wadah dalam mengembangkan desa wisata.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kampung Adat Wajo diakui keberadaannya oleh Pemerintah Desa dimana melalui program-program dan kegiatan yang sudah dijalankan. Namun yang masih jadi perhatian pemerintah desa agar kedepannya bisa dibuat peraturan atau peraturan desa yang mengatur secara khusus kegiatan pariwisata di desa tersebut. Peraturan ini dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengembangan dan pengelolaan desa wisata, termasuk dalam hal izin operasional, penggunaan lahan, atau perlindungan lingkungan.

5.3.2 Pengakuan Otoritas Tingkat Kabupaten

Pengakuan otoritas tingkat kabupaten terhadap desa wisata sangat penting karena dapat memberikan dukungan yang lebih luas dalam pengembangan pariwisata. Melalui pengakuan ini, desa wisata dapat memperoleh akses ke sumber daya, bantuan, dan peluang kolaborasi yang akan membantu dalam kemajuan pariwisata di desa Wajo.

Adytama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bapak Primus Jawa berpendapat mengenai Pengakuan otoritas terkait.

Kami dari Dinas Pariwisata sudah menetapkan secara resmi keberadaan Kampung Adat Wajo sebagai desa wisata pada tahun 2020 melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata.

Kepala Desa Wajo membenarkan hal terkait pengakuan Otoritas tingkat kabupaten, beliau berpendapat bahwa

Pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas Pariwisata sudah mengakui keberadaan Desa wisata Wajo melalui surat keputusan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020. Selain itu juga kampung Adat Wajo sudah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata walau dalam bentuk virtual oleh Dinas Parwisata.

Bapak paulus Jogo berpendapat bahwa terkait pengakuan otoritas terkait tingkat kabupaten

Kalau pengakuan dari tingkat Kabupaten kami sudah dapatkan sejak tahun 2020 oleh Dinas Pariwisata. Dalam proses pengembangannya juga Dinas Pariwisata sudah banyak memfasilitasi dengan memberikan pelatihan tata kelola pariwisata.

5.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Saran dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan Desa Wisata yang nantinya dapat berpengaruh pada minat wisatawan untuk datang mengunjungi Kampung Adat Wajo.

5.4.1 Tersedianya akses yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai daerah tujuan wisata.

Adytama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bapak Primus Daga berpendapat mengenai pembangunan infrastruktur jalan menuju Kampung Adat Wajo.

Dalam pengembangan pariwisata sendiri Pemerintah Kabupaten bersama Dinas Pariwisata Nagekeo membangun infrastruktur dimulai dengan memperpendek jarak tempuh ke destinasi wisata lewat perbaikan atau pembangunan jalan, salah satunya seperti proyek pembangunan jalan. Untuk pembangunan jalan sekarang sedang ditangani oleh dinas PUPR Kabupaten Nagekeo, dengan melakukan perbaikan ruas jalan dari Raja menuju Keo Tengah yang merupakan jalan utama menuju Kampung adat Wajo. Dan untuk pembangunan jalan dari gerbang masuk menuju kampung adat Wajo sekarang masih dalam tahap perencanaan dari kami, karena untuk sekarang masih minimnya APBD, mungkin kedepannya akan dilakukan perbaikan jalan.

Dalam penyediaan akses untuk mempermudah wisatawan menuju desa wisata Kepala Desa Wajo bapak Gabriel Wundu berpendapat bahwa:

Kami dari pemerintah desa sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dari pintu masuk menuju kampung adat Wajo, karena pemerintah desa tidak memiliki cukup dana di APBDes untuk membangun semua ini sehingga sampai saat ini ruas jalan pintu masuk menuju kampung adat Wajo belum diaspal bahkan untuk dirabat sekalipun karena minimnya anggaran.

Hal serupa juga ditambahkan oleh bapak Arnoldus Jagon selaku Ketua Adat desa Wajo bahwa

Kalau untuk jalan dari pintu masuk menuju Kampung Adat Wajo memang sudah lama belum diperhatikan oleh pemerintah, kondisinya kalau musim hujan otomatis tidak ada kendaraan yang bisa lewat karena masih rusak (tanah) dan licin. Kami masyarakat meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi jalan ini yang menjadi akses satu-satunya wisatawan kalau ingin berkunjung ke kampung adat Wajo.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan utama menuju kampung adat wajo sudah dilakukan perbaikan dari Raja menuju Keo Tengah. Sedangkan untuk akses dari pintu masuk menuju Kampung Adat Wajo masih rusak (tanah). Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan hal ini karena dengan akses yang baik juga dapat menjadi salah satu minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Gambar 5.5

Ruas Jalan Pintu Masuk Kampung Adat Wajo



Sumber: Dokumentasi Peneliti

5.4.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Setiawan (2015) Mengatakan Fasilitas merupakan akomodasi yang mencakup sarana dan prasarana, akomodasi merupakan bangunan yang didirikan secara komersial seperti hotel, *Homestay*, *Villa*, *Resort* dan lainnya, dimana terdapat kamar tidur dan fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana. Pengadaan fasilitas ini dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat lokal .

Adytama pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam wawancara terkait penyediaan sarana dan prasarana pariwisata mengatakan

Sarana dan Prasarana yang ada di Kampung Adat Wajo memang belum memadai. Namun ini menjadi usaha kami kedepannya karena untuk saat ini penyediaan sarana dan prasarana pariwisata belum kami adakan karena

mengingat sumber dana pemasukan kami dari APBD, sedangkan kondisi APBD Kabupaten Nagekeo yang di alokasikan kepada Dinas Pariwisata tidak cukup besar.

Kepala Desa Wajo Bapak Gabriel Wundu berpendapat mengenai pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata.

Sarana dan prasarana yang ada di Kampung Adat Wajo ini memang belum tersedia untuk saat ini. Saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Daerah untuk pengadaan fasilitas umum seperti *homestay*, *vila*, *resort* dan lainnya. Dan untuk sekarang kami bersama masyarakat berupaya untuk melakukan perbaikan gapura atau papan penunjuk arah yang sudah rusak.

Masyarakat desa Wajo, Bapak Petrus Jogo juga berpendapat bahwa terkait sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Desa Wajo

Kalau dilihat dari sarana prasarana yang ada di kampung Adat Wajo ini bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna karena belum tersedianya fasilitas umum, akses jaringan yang kurang baik, selain itu gapura yang menjadi penanda sudah rusak diterpa angin. Kami sebagai masyarakat butuh bantuan dan kerja sama dari pemerintah, karena kalau kami bergerak sendiri tanpa bantuan pemerintah itu tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil yang peneliti temukan di lapangan untuk sarana dan prasarana yang ada di Kampung Adat Wajo masih Kurang bahkan

belum tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti homestay, rumah makan, akses jaringan yang kurang baik